

## KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PKL BANTARAN KALI ES SAWAH BESAR KOTA SEMARANG TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI PEDAGANG

Alan Setiawan<sup>a</sup>, Hendrianto Sundaro, S.E., M.T<sup>b</sup>, Agus Sarwo Edy Sudrajat<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

[hendri01190@gmail.com](mailto:hendri01190@gmail.com)

### Info Artikel:

- Artikel Masuk: 28/12/2022
- Artikel diterima: 31/12/2022
- Tersedia Online: 10/01/2022

### Abstrak

*Kajian Dampak Kebijakan Relokasi PKL Bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Pedagang. Upaya pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penataan PKL di Bantaran Kali Es Sawah Besar merupakan salah satu tujuan dari program normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Normalisasi tersebut ditandai dengan adanya aktivitas merapikan sungai, tidak hanya di dalam dan di pinggir (DAS dan sempadan) akan tetapi juga di sisi kanan dan kiri sungai yang ditempati oleh PKL. Pelaksanaan program relokasi PKL sebagai salah satu upaya normalisasi sungai BKT yang dilakukan dinilai mendapatkan hambatan dari warga dan para pedagang yang terdampak relokasi seperti terjadinya penolakan dan menganggap bahwa lokasi relokasi kurang strategis untuk berdagang sehingga para pedagang enggan menempati lokasi relokasi yang sudah disiapkan pemerintah sebelumnya. Selain itu, adanya kebijakan publik melalui program relokasi PKL yang dilakukan pemerintah juga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi PKL. Menurut para PKL kebijakan relokasi hanya fokus terhadap keberhasilan proyek normalisasi sungai BKT dan Kali Es saja sedangkan untuk kehidupan para PKL setelahnya kurang mendapat perhatian. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terkait penataan atau relokasi PKL di Bantaran Kali Es Sawah Besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi para pedagang pascarelokasi.*

**Kata kunci:** Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Dampak Sosial dan Ekonomi.

## 1. PENDAHULUAN

Dari berbagai macam permasalahan perkotaan yang ada, permasalahan tata kota dan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu fenomena sosial ekonomi yang selalu menjadi sorotan. Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:40-44) dalam jurnal Rahayu et al 2012 mengungkapkan bahwa aktivitas pelaku usaha sektor informal/PKL atau bisa disebut dengan istilah "hawkers", sering kali menimbulkan permasalahan yang berdampak terhadap struktur tata ruang kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap menghambat pelaksanaan pembangunan dan merusak keindahan tata ruang kota.

Dari sisi ekonomi PKL memang memberikan dampak positif terhadap peluang usaha bagi masyarakat, pedagang kaki lima dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sebab munculnya sektor-sektor informal / PKL tidak memerlukan modal yang besar untuk memulai usaha, selain itu dalam memulai usahanya sektor informal tidak memerlukan keahlian khusus sehingga masyarakat yang berasal dari kalangan menengah kebawah atau dari kalangan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah dapat melakukannya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Warunsiri dalam Setyowati, Eka (2013:3) bahwa biasanya, seorang pekerja di sektor informal itu tidak berpendidikan, tidak terampil dan produktivitasnya rendah, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal sangat rendah. Inilah mengapa sektor informal dapat terus tumbuh dan berkembang pesat. Jika dilihat dari sisi ekonomi keberadaan PKL memang memberikan dampak yang positif terhadap terbukanya suatu lapangan pekerjaan, namun jika dilihat dari sisi sosial keberadaan PKL memberikan dampak yang negatif di wilayah perkotaan karena dianggap mengganggu ketertiban dan kebersihan. Hal ini pula yang terjadi pada Kota Semarang, tepatnya di Bantaran Kali Es Sawah Besar yang mana dipenuhi oleh PKL.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang yang menggunakan bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) mengakibatkan berbagai macam persoalan baik secara fisik maupun non fisik. Dari segi fisik keberadaan PKL di bantaran Kali Es Sawah Besar mengakibatkan penyempitan

aliran sungai, pendangkalan sedimentasi akibat aktivitas masyarakat di sekitar sungai seperti membuang sampah sembarangan, dan juga pemandangan kumuh yang diakibatkan oleh adanya pembangunan bangunan-bangunan liar yang sembarangan. Sedangkan dari segi non fisik keberadaan PKL mengakibatkan kemacetan akibat padatnya aktivitas yang dilakukan di kawasan, penurunan kualitas kesehatan dan juga kebersihan lingkungan serta ketertiban. (Hasil Observasi Lapangan, 2022).

Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban PKL dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Hal ini bertujuan agar terciptanya keindahan tata ruang kota dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan di wilayah perkotaan. Adanya program Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 7 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bencana di Wilayah Kota Semarang melalui normalisasi Sungai BKT memunculkan kebijakan relokasi PKL di Bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang terhadap masyarakat yang mengakibatkan sekitar 104 para pedagang kecil harus berpindah dari bantaran Sungai BKT. Upaya yang dilakukan oleh Pemkot Semarang melakukan normalisasi Sungai BKT selain untuk melakukan penataan dan penertiban PKL juga bertujuan untuk menangani permasalahan banjir di Wilayah Timur Kota Semarang, seperti wilayah Kaligawe, Sawah Besar, dan Muktiharjo Lor. Oleh karena itu penting untuk dilakukan studi dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang.

## 2. DATA DAN METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan sampling dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling.. Jumlah bangunan bantaran kali es sawah besar yang direlokasi adalah 104 bangunan dengan jumlah pedagang 78 orang maka didapat jumlah populasi yaitu 78 pedagang.

Menurut Gay & Diehl (1992) Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Dengan demikian sampel yang dipilih dalam penelitian yaitu 10% dari jumlah populasi pedagang sehingga didapatkan jumlah sampel sejumlah 8 pedagang. Selain para pedagang yang akan dipilih sebagai sampel atau informan peneliti juga memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman terkait relokasi PKL di bantaran Kali Es Sawah Besar yakni Kepala Kelurahan Sawah Besar dan Ketua Paguyuban PKL Sawah Besar

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan pengolahan data merujuk pendapat Miles and Huberman yakni data collection, data reduction, data display, dan data conclusion. Validasi data dilakukan dengan triangulasi metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a) Dampak Sosial Relokasi PKL Bantaran Kali Es Sawah Besar



Sumber : Dokumentasi Penelitian 2022  
Gambar 1. Tempat Relokasi

Dampak pertama yaitu terkait ketidakpuasan pedagang terhadap tempat relokasi, berdasarkan dari beberapa pernyataan para informan dapat diketahui bahwa para pedagang merasa tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keinginan karena dianggap masih sepi karena belum ramai pelanggan dan juga tempat yang disediakan tidak memadai karena hanya berukuran sekitar 1,5 x 2 meter saja.

Dampak kedua yaitu tempat usaha yang baru kurang sestrategis. Tempat yang lama, berdasarkan beberapa pernyataan yang sudah diungkapkan oleh para pedagang maka dapat diketahui bahwa sebenarnya hampir sebagian besar permasalahan pedagang relatif sama, yang mana perpindahan lokasi usaha yang awalnya dulu berada di pinggir Jl.Sawah Besar kini telah pindah lebih ke dalam jalan perkampungan sehingga lokasi usaha menjadi kurang strategis dan mengakibatkan pelanggan sebelumnya tidak mengetahui keberadaan lokasi usaha para pedagang yang sekarang.

Dampak Ketiga yaitu terkait kenyamanan usaha, berdasarkan beberapa pernyataan yang di dapat maka diketahui bahwasanya para pedagang merasa jika tempat baru yang mereka tempati saat ini sudah jauh lebih aman jika dibandingkan saat menempati tempat yang lama. Hal ini karena mereka saat ini sudah menempati tempat yang legal sehingga sudah tidak perlu khawatir lagi akan digusur. Sebagian besar para PKL lebih memilih untuk menyewa tanah dan mendirikan usahanya kembali di tanah sewaan tersebut, ada juga sebagian yang lebih memilih untuk mendirikan usahanya kembali di halaman rumah mereka masing-masing daripada harus menyewa tanah untuk mendirikan usaha.

Dampak sosial terakhir yaitu belum adanya kemajuan usaha di tempat yang baru, berdasarkan dari pernyataan dari beberapa informan maka dapat diketahui bahwa lokasi relokasi berdampak terhadap kemajuan usaha para PKL di masa sekarang maupun yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari informan yang diteliti, sebagian besar pedagang menyatakan belum adanya kemajuan setelah pindah di tempat yang baru. Menurut salah satu dari teori lima dimensi kebijakan yang diungkapkan oleh Islamy (1997:115) dan Winarno (2002:171-175) dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh terhadap kondisi sekarang atau keadaan di masa yang akan datang. Dampak sosial dari adanya relokasi PKL terhadap kemajuan usaha pedagang akan berpengaruh terhadap kondisi atau keadaan di masa yang akan datang. Permasalahan yang timbul di tempat jualan yang baru akan menghambat kemajuan dan perkembangan usaha pedagang.

## **b) Dampak Ekonomi Relokasi PKL Bantaran Kali Es Sawah Besar**

Dampak yang pertama yaitu terjadinya tingkat perubahan pendapatan di tempat usaha yang baru, berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pedagang yang mengalami peningkatan pendapatan sebagian besar adalah para pedagang yang berjualan makanan dan minuman ringan. Ada juga sebagian pedagang yang beralih profesi yang semula berjualan cacing dan lumut untuk memancing kini berjualan makanan dan minuman di tempat yang baru, hal ini terjadi karena pedagang menyesuaikan tempat berjualan yang sekarang.

Menurut Wibawa (1994:54) dampak kebijakan publik terhadap para pekerja dari segi ekonomi yaitu berupa naik atau turunnya jumlah pendapatan karena kondisi pekerjaan mereka yang berubah, sehingga dampak ekonomi dalam pembahasan ini adalah perubahan pendapatan yang dialami oleh para pedagang akibat adanya suatu kebijakan yaitu relokasi PKL Bantaran Kali Es Sawah Besar. Berdasarkan hasil penelitian

menyatakan bahwa peningkatan jumlah pendapatan yang dialami oleh pedagang di tempat yang baru dipengaruhi oleh jualan atau usaha yang dijalankan, peningkatan pendapatan dialami oleh para pedagang makanan dan minuman saja. Salah seorang pedagang juga mengatakan bahwa dengan beralih profesi menjadi penjual makanan dan minuman tingkat pendapatan yang didapatkan perharinya malah jauh lebih banyak daripada saat berjualan cacing dan lumut di tempat yang lama.

Dampak yang kedua yaitu meningkatnya biaya operasional untuk menjalankan usaha di tempat yang baru, berdasarkan dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan maka dapat diketahui bahwa setelah direlokasi para pedagang mendapatkan dampak terhadap tambahan biaya operasional untuk menjalankan usaha mereka. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan tempat gratis untuk para pedagang yang berada di Pasar Barito Baru Penggaron tetapi karena lokasi tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pedagang akhirnya mereka lebih memilih untuk mendirikan usahanya kembali di tempat yang dianggap

berpotensi walaupun harus rela untuk mengeluarkan biaya operasional untuk menyewa tanah.

Menurut Sinaga, (2004:134) salah satu dampak negatif dari ekonomi yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Sinaga kebijakan relokasi PKL Bantaran Kali Es Sawah besar mengakibatkan dampak ekonomi terhadap meningkatnya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh para pedagang untuk menjalankan usahanya. Para pedagang yang kini menempati tempat usaha yang baru harus mengeluarkan biaya operasional tambahan untuk menyewa tanah karena mereka enggan menempati tempat yang disediakan gratis oleh pemerintah di Pasar Barito Baru Penggaron

Selain itu juga para pedagang mengungkapkan bahwa pindah dari lokasi lama ke tempat yang baru memerlukan modal yang tak sedikit, modal sangat diharapkan oleh para pedagang untuk dapat membangun usaha mereka kembali. Tapi kenyataannya para pedagang tidak mendapatkan ganti rugi atau bantuan modal sepeserpun dari pihak pemerintah, pemerintah hanya menyediakan kios-kios yang ada di Pasar Barito Baru Penggaron yang menurut pedagang kios tersebut tidak layak sehingga mereka lebih memilih untuk mengkosonginya. Dalam temuan Fauziah (2016) menyatakan untuk bantuan modal usaha juga belum pernah didapatkan PKL, karena PKL tersebut belum legal dan terdaftar di Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo. Padahal bantuan permodalan sangat diharapkan oleh PKL untuk mengembangkan usahanya dan kemampuan yang dimiliki untuk membuat sesuatu sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **4. SIMPULAN**

Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Kota Semarang terhadap PKL Bantaran Kali Es Sawah Besar yaitu dengan melakukan relokasi. Relokasi PKL memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

## Dampak Sosial

Dampak sosial yang dirasakan oleh para pedagang akibat adanya relokasi PKL di Bantaran Kali Es Sawah Besar yang pertama yaitu dari segi kepuasan, para pedagang merasa bahwa tempat relokasi dan tempat usaha yang sekarang belum bisa memberikan kepuasan untuk menjalankan usaha kembali. Kedua, dari segi kenyamanan, di tempat yang baru para PKL merasa lebih aman karena sudah berstatus legal, sedangkan saat menempati tempat yang lama pedagang lebih merasa nyaman karena lebih ramai pelanggan yang datang. Ketiga, melemahnya hubungan interaksi sosial antara pedagang dengan pelanggan, pedagang mengalami jumlah penurunan pelanggan di tempat yang baru, selain itu para pedagang lebih memilih untuk menempati lokasi usaha yang masih berada di sekitar Bantaran Kali Es Sawah Besar dengan harapan ada peluang kemajuan usaha jika berjualan kembali di sekitar tempat yang lama.

## Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh PKL di Bantaran Kali Es Sawah Besar setelah direlokasi yang pertama yaitu terjadinya perubahan pendapatan setelah menempati tempat baru, sebagian besar pedagang mengalami penurunan tingkat pendapatan yang cukup signifikan penurunan tingkat pendapatan mencapai angka sebesar 20-75 %. Pedagang harus beradaptasi untuk menghadapi hal yang baru seperti penurunan pendapatan rata-rata meskipun lambat-laun pendapatan itu perlahan kembali pulih seiring dengan berjalannya waktu. Disisi lain sebagian pedagang lainnya juga mengalami peningkatan pendapatan setelah menempati tempat yang baru dan beralih profesi berdagang. Dari segi biaya operasional para pedagang saat ini harus rela mengeluarkan biaya operasional tambahan untuk menjalankan usahanya di tempat yang baru seperti menyewa tanah. Selain itu juga pedagang harus meningkatkan biaya operasional mereka akibat tidak adanya bantuan modal atau ganti rugi yang didapatkan.

Demi terciptanya keadaan yang damai dan nyaman saat menempati tempat usaha yang baru, maka pedagang harus lebih bisa saling berinteraksi dengan

pemerintah setempat agar tercipta suatu solusi untuk memecakan masalah bersama.

Bagi Pemerintah diharapkan Lebih mempertimbangkan kesesuaian tempat yang akan dijadikan relokasi para pedagang dan juga lebih memperhatikan perkembangan PKL agar bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah relokasi bagi pedagang. Selain itu demi terciptanya tempat relokasi yang lebih kondusif dan tata letak yang selalu rapi, pemerintah seharusnya memperhatikan tempat dan kenyamanan bagi pedagang agar selalu dapat menarik para pengunjung.

## 5. REFERENSI

- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers
- Armi, Aldinur. Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). Diss. Brawijaya University, 2016.
- Arfiani, Riza Irma. "Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun Ke GOR Delta Sidoarjo)." *Publika* 5.4 (2017)
- Buana Praja Murti, Anggoro. 2015. *Tanggapan PKL Terhadap Relokasi Tempat Usaha Ke Pusat Kuliner Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi*.
- Hakim, Abdul. "Evaluasi Kebijakan Ekonomi Sektor Informal : Studi Terhadap Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember." *REFORMASI* 4.1 (2014).
- Heriyanto, Aji Wahyu. "Dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang." *Economics Development Analysis Journal* 1.1 (2012).
- Hidayati, Nurani Nurul, and Hadi Wahyono. "Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang." *Teknik PWK*

- (Perencanaan Wilayah Kota) 2.3 (2013): 328-337.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Junaidi, M., Ramayanto Ramayanto, and Nurlailatul Nurlailatul. "Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Wohe Kabupaten Bima." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 6.1 (2019): 1-10.
- Kristian, Indra. "Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19.2 (2021): 23-34.
- Meutia, Intan Fitri. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Prasetya, Mochammad Aringga, and Luluk Fauziah. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4.2 (2017): 135-150.
- Pratiwi, Maya Nurusuna. 2020. *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi*
- Samahita, Randi, and Nunik Retno Herawati. "EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PASAR REJOMULYO KOTA SEMARANG." *Journal of Politic and Government Studies* 8.04 (2019): 391-400.
- Saraswati, Adelina, and Achmad Taufiq. "Evaluasi Kebijakan Relokasi Pasar Barito Kota Semarang Tahun 2018 Studi Kasus Relokasi Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron." *Journal of Politic and Government Studies* 9.03 (2020): 11-20.
- Saleh, Linda, Ronny Gosal, and Frans Singkoh. "Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado." *JURNAL EKSEKUTIF* 3.3 (2019).
- Setyowati, Eka. *Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta*. Diss. Universitas Brawijaya, 2013.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusida, Ermita, et al. "Kebijakan publik dan dampaknya terhadap aktivitas pedagang kaki lima (PKL): Studi kasus di Kota Batu." *TRANSAKSI* 11.1 (2019): 44-50

